

# Risalah Sidang Bpupki

When somebody should go to the ebook stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we present the books compilations in this website. It will utterly ease you to look guide **Risalah Sidang Bpupki** as you such as.

By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you set sights on to download and install the **Risalah Sidang Bpupki**, it is categorically easy then, before currently we extend the link to buy and create bargains to download and install **Risalah Sidang Bpupki** fittingly simple!

## **HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH TAMAN NASIONAL (EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA)** - Dr. Jabalnur, SH., MH 2020-03-05

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.1 Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.2 M.A Jaspas3 dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41 Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masing-masing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan

ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven4 untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.

## **Asuhan Keperawatan Jiwa** - Hera Hijriani, S.Kep., Ners., M.Kep 2021-02-12

Buku ini menyampaikan materi secara lengkap tentang Asuhan Keperawatan Jiwa. Di antara Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Perilaku Kekerasan dan Resiko Bunuh Diri, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Halusinasi, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Waham, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial, Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami Defisit Perawatan Diri, Asuhan Keperawatan Pada Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Korban Pemerkosaan, Penanganan Anak Korban KDRT, Korban Trafficking, dan Anak Jalanan, Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa Profesional Komunitas, Terapi Psikofarmaka, Somatic dan Modalitas.

## Rasio Sebagai Pedoman, Rasa Sebagai Acuan - Afthonul Afif, dkk.

Tulisan-tulisan dalam buku ini membantu untuk menghidupkan kembali kehidupan dan filosofi Ki Ageng Suryomentaram. Ki Ageng Suryomentaram merupakan salah satu dari sejumlah sosok tersohor dalam kehidupan pemikiran dan religius Jawa pada akhir abad ke-19 dan

awal abad ke-20. Ia dilahirkan di lingkungan yang berporos pada keraton, sebagaimana Ahmad Dahlan, namun bertolak dari perpaduan antara kebudayaan keraton dan empirisme filosofis untuk menghadapi persoalan dan pertanyaan modernitas serta kondisi kolonial yang dialami oleh apa yang dulu disebut Hindia Belanda dan sekarang dikenal sebagai Indonesia. Sebagaimana yang terlihat pada semua tulisan dalam buku ini, Ki Ageng Suryomentaram adalah sosok yang unik dan istimewa. Pada masa di mana rasionalitas menjadi salah satu ciri dari Renaisans Jawa, ini menjadi karakteristik penentu dari pemikiran Ki Ageng Suryomentaram. Kendati ia jelas-jelas merupakan seorang Jawa Muslim, tulisan-tulisannya dapat dipahami sebagai filsafat rasionalis tentang diri, akal budi, dan masyarakat. Ia tidak terlalu terlibat dengan modernisme Muslim atau mistisisme kebatinan modern. Kendati ia menekankan pentingnya hidup di antara rakyat jelata sepanjang sebagian besar hayatnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya dipengaruhi oleh pemikiran Marxis. Ki Ageng Suryomentaram merupakan pemikir yang rasional dan juga jelas-jelas sekular. Ini tidak berarti bahwa ia adalah seorang sekularis sebagaimana seseorang yang tidak beragama. Tulisan-tulisannya nyaris tak mengisyaratkan apa-apa perihal keyakinannya dan membuat kita tak bisa menyimpulkan apa-apa terkait hal ini. Ia berkuat dengan pencarian keselarasan serta kebahagiaan di dunia ini, bukan di dunia sana. Adalah hal yang jelas bahwa Ki Ageng Suryomentaram merupakan nasionalis Indonesia yang teguh dan bahwa ia menerima Pancasila sebagai dasar dari kehidupan nasional. Adalah jelas juga, sebagaimana yang diamati Bonneff, bahwa ia lebih berkuat dengan elemen dari ideologi nasional tersebut yang menyangkut keadilan sosial alih-alih "Ketuhanan yang Maha Esa," yang jelas-jelas religius. Sebagaimana Tolstoy, ia juga curiga terhadap kekuatan negara serta menekankan peran individu sebagai aktor sosial dan moral yang independen dari negara. Mark Woodward

**Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945 -** Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia 1992

Documentation of the proceedings of the Explorative Council on Preparatory Efforts for Indonesia's Freedom, May 29-June 1, 1945 and of the Committee for the Preparation of Indonesia's freedom, 18 & 19 August, 1945.

*Challenging the Secular State* - Arskal Salim 2008-09-30

*Challenging the Secular State* examines Muslim efforts to incorporate shari'a (religious law) into modern Indonesia's legal system from the time of independence in 1945 to the present. The author argues that attempts to formally implement shari'a in Indonesia, the world's most populous Muslim state, have always been marked by tensions between the political aspirations of proponents and opponents of shari'a and by resistance from the national government. As a result, although pro-shari'a movements have made significant progress in recent years, shari'a remains tightly confined within Indonesia's secular legal system. The author first places developments in Indonesia within a broad historical and geographic context, offering a provocative analysis of the Ottoman empire's millet system and thoughtful comparisons of different approaches to pro-shari'a movements in other Muslim countries (Saudi Arabia, Iran, Pakistan). He then describes early aspirations for the formal implementation of shari'a in Indonesia in the context of modern understandings of religious law as conflicting with the idea of the nation-state. Later chapters explore the efforts of Islamic parties in Indonesia to include shari'a in national law. Salim offers a detailed analysis of debates over the constitution and possible amendments to it concerning the obligation of Indonesian Muslims to follow Islamic law. A study of the Zakat Law illustrates the complicated relationship between the religious duties of Muslim citizens and the nonreligious character of the modern nation-state. Chapters look at how Islamization has deepened with the enactment of the Zakat Law and demonstrate the incongruities that have emerged from its implementation. The efforts of local Muslims to apply shari'a in particular regions are also discussed. Attempts at the Islamization of laws in Aceh are especially significant because it is the only province in Indonesia that has been allowed to move toward a

shari'a-based system. The book concludes with a review of the profound conflicts and tensions found in the motivations behind Islamization.

**Islam dan Muslim di Negara Pancasila** - M. Fuad Nasar 2017-11-07  
Agenda pergerakan untuk menghidupkan kembali pemerintahan khilafah menuai kontroversi, termasuk di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, karena ingin mengubah bentuk negara dan sistem pemerintahan republik yang disepakati oleh para pendiri negara kita. Pemerintahan khilafah yang mengalami masa kejayaan dan kejatuhan telah menjadi bagian dari sejarah politik umat Islam yang tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Menurut teori manusiawi, di luar kehendak Allah, negara-negara berpenduduk Muslim di seluruh dunia tidak mungkin bisa dipersatukan di bawah satu negara dan satu bendera pemerintahan seperti di masa lampau. Cita-cita menegakkan khilafah dalam konteks kekinian dan kedisninan bukan solusi tepat atas problema Dunia Islam, tetapi spirit dakwah-nya dapat diambil sebagai kontribusi moral dalam membangun masa depan umat dan bangsa yang lebih baik. Masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini bukan hanya isu ideologi dan radikalisme, baik radikalisme agama maupun radikalisme sekuler. Di samping itu, ketimpangan ekonomi adalah masalah krusial bangsa yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse's tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat setelah Rusia, India, dan Thailand dalam kategori negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia, dimana hampir separoh (49,3%) kekayaan nasional di negara kita dikuasai oleh 1% kelompok masyarakat terkaya. Ketimpangan ekonomi berpotensi membawa bangsa ke pusaran konflik dan disintegrasi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat menyuburkan radikalisme dan melemahkan ideologi negara. Dalam kaitan ini, kebangkitan kelas menengah Muslim dipandang sebagai salah satu katalis perbaikan terhadap kondisi yang ada, di samping peran strategis yang dimainkan pemerintah melalui politik ekonomi dan kebijakan nasional yang memberikan keberpihakan. Buku Islam dan Muslim di Negara Pancasila merupakan kompilasi beberapa tulisan saya mengenai

agama dan negara dalam konteks keIndonesiaan serta sekilas jejak tokoh Muslim dalam mengawal NKRI. Harapan saya, buku ini menjadi jembatan sejarah dan memperkaya sudut pandang kita semua tentang kehidupan beragama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Pendidikan Pancasila* - Ujang Permana, S.Sos, M.Si 2021-02-11  
Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, dan sebagai sumber rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan bangsa.

**Falsafah & Teori Keperawatan** - Heni, S.Kep.,Ners., M.Kep dan Idris Handriana,S.Kep.,.M.Kep 2021-02-12

Buku ajar ini membahas tentang falsafah, paradigma dan konseptual model dari teori keperawatan, seras prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan. Setelah mempelajari buku ini diharapkan mahasiswa dapat memahami falsafah keperawatan, dapat menerapkan konsep paradigma keperawatan dan berbagai teori keperawatan terpilih dalam berbagai situasi serta dapat menganalisis prinsip-prinsip pendekatan secara holistik konteks keperawatan.

**Constitution Writing, Religion and Democracy** - Asli Ü. Bâli 2017-02-02

What role do and should constitutions play in mitigating intense disagreements over the religious character of a state? And what kind of constitutional solutions might reconcile democracy with the type of religious demands raised in contemporary democratising or democratic states? Tensions over religion-state relations are gaining increasing salience in constitution writing and rewriting around the world. This book explores the challenge of crafting a democratic constitution under conditions of deep disagreement over a state's religious or secular identity. It draws on a broad range of relevant case studies of past and current constitutional debates in Europe, Asia, Africa and the Middle East, and offers valuable lessons for societies soon to embark on constitution drafting or amendment processes where religion is an issue of contention.

Monarchies and decolonisation in Asia - Robert Aldrich 2020-06-05

With original case studies of a more than a dozen countries, *Monarchies and decolonisation in Asia* offers new perspectives on how both European monarchs who reigned over Asian colonies and Asian royal houses adapted to decolonisation. As colonies became independent states (and European countries, and other colonial powers, lost their overseas empires), monarchies faced the challenges of decolonisation, republicanism and radicalism. These studies place dynasties - both European and 'native' - at the centre of debate about decolonisation and the form of government of new states, from the sovereigns of Britain, the Netherlands and Japan to the maharajas of India, the sultans of the East Indies and the 'white rajahs' of Sarawak. It provides new understanding of the history of decolonisation and of the history of modern monarchy.

Constitutional Foundings in Southeast Asia - Kevin YL Tan 2019-05-30

This volume focuses on the making, nature, and role of the first modern constitutions at the founding of the modern nation-states in Southeast Asia. These historical essays add richly to our understanding and appreciation of the founding moments and to the theory and practice of constitutionalism in these states. This volume makes three significant contributions. First, it helps plug the wide knowledge gap in comparative constitutional history in Southeast Asia. Second, it furthers our understanding of contemporary constitutional practice and also anticipates possible developmental trajectories in light of the foundational values embedded in and manifested through these constitutions. Third, through the comparative historical study of these early constitutions, plausible theoretical insights may be gained to further our understanding of Southeast Asia's constitutional history. The book is essential reading for those wishing to obtain a deeper understanding of the constitutional foundations of Southeast Asia.

*Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan* - Ahmad Syafii Maarif 2009

Historical perspectives on the existence of Islam in Indonesia and its contribution to the construction of Indonesian politics, government, and social structure.

*Konflik di balik proklamasi* - St Sularto 2010

Historical facts behind the preparation of the Indonesian independence in 1945.

Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi - Benny K. Harman 2013-07-31

"Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Mohamad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman yang berwenang menguji UU. Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan dari perubahan pemikiran seluruh bangsa. Terutama pemikiran dari para tokoh bangsa mengenai hukum, konstitusi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini menguraikan secara lengkap perkembangan pemikiran mengenai pengujian UU terhadap UUD dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dimulai dari masa sebelum kemerdekaan; masa Revolusi (1945-1950); masa Demokrasi Parlementer (1950-1959); masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965); masa Orde baru (1965-1999), dan masa Reformasi (1999-2004). Diuraikan pula tentang arti penting yurisprudensi MK, mengingat banyak hal belum diatur secara tegas dalam UUD maupun UU terkait pelembagaan pengujian UU oleh MK. Menurut penulis, pola yurisprudensi lebih cepat menyelesaikan persoalan dibanding mengubah UU atau UUD. Dengan kata lain, yurisprudensi MK bisa menjadi jalan keluar untuk menyempurnakan kekurangan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pendidikan Pancasila - TONI NASUTION, M.Pd 2022-11-26

Dalam buku ini ditemukan kajian membahas mengenai Identitas Nasional, Konsep dasar Pendidikan Pancasila, latar belakang lahirnya Pancasila, makna lambang Garuda Pancasila, buku Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa serta Pancasila sebagai ideologi nasional untuk kepentingan pendidikan serta disajikan secara ilmiah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pencapaian tujuan

pendidikan nasional.

**Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia** - Nadirsyah Hosen  
2007

This book focuses on constitutional reform in Indonesia (1999-2002) from the perspective of shari'a. The study reveals one possible picture of how Islam and constitutionalism can co-exist in the same vision, not without risk of tension, but with the possibility of success.

Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002 - Denny Indrayana 2008

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan - Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

Secara teoritis dan konseptual, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam perkembangannya, mediasi dimasukkan ke dalam cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut yang dirinci atas lima bab. Bab I tentang pendahuluan, Bab II tentang Konsep dan Teori Peradilan, Bab III tentang Dari Sengketa Perdata ke Gugatan Perdata, Bab IV tentang Beberapa Aspek Mengenai Mediasi dan Bab V tentang Mediasi; Dari Luar Pengadilan ke Dalam Pengadilan yang dilengkapi dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta Mediasi Perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan bagian penting dalam mencari penyelesaian secara mediasi. Buku ini diperuntukkan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, pelaku usaha serta kalangan mahasiswa

Rapsodia Filsafat - Samuel S. Lusi, Ricky Arnold Nggili

Filsafat selama ini salah dipahami sebagai "ilmu yang njelimet" sehingga dihindari, bahkan kerap dimusuhi karena salah dipahami seolah belajar filsafat akan menjadi ateis. Salah paham ini perlu diluruskan, terutama di dunia perguruan tinggi. Menurut Franz Magnis-Suseno, filsafat adalah "ilmu kritis". Belajar sejarah filsafat tidak lain mempelajari sejarah ilmu-ilmu, sejarah pemikiran kritis (perdebatan antara filsuf dan mashab), juga mengkultivasi tradisi berdialektika secara kritis, di samping memperkaya perspektif keilmuan warga akademik. Karena itu, filsafat

sangat dibutuhkan di perguruan tinggi. Agar misi itu terlaksana, dibutuhkan "mentor-mentor" yang ahli filsafat, untuk mendidik sejumlah warga akademik sedemikian sehingga setelah pembelajaran dapat menulis "wawasan filosofisnya" sebagai hasil pembelajaran. Buku ini merupakan hasil dari proses itu, di mana para mentor, seperti: Franz Magnis-Suseno, Dr. A. Setyo Wibowo, Dr. Thomas Hidyta Tjaya, Dr. F. Budi Hardiman memberikan dasar-dasar, lalu para peserta yang telah "dialatih" menunjukkan hasilnya dengan menulis. Bisa dikatakan, buku ini merupakan "sebuah kolaborasi" untuk menunjukkan bahwa belajar filsafat itu tidaklah sulit seperti dibayangkan, asalkan belajar dari para mentor yang ahli.

*Teologi Kiri* - Abdul Munir Mul Khan

Ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin tentu tidak diragukan lagi. Hal ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika mengejawantahkan ajaran mulia ini di tengah-tengah umatnya. Bahkan, kepada orang-orang yang menolak ajarannya pun, Nabi tetap bersikap adil, lebih dari itu Nabi mengedepankan kasih sayang. Banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi selalu membela kaum yang lemah. Pertanyaan pentingnya, apakah para pemimpin umat sekarang sudah berpihak kepada para kaum mustadh'afin ketimbang sibuk "ngurus" Tuhan? Buku ini mengusung persoalan penting bahwa ajaran Islam seyogianya diletakkan di atas fondasi kemanusiaan. Sehingga, para elite Islam berhasil menuntaskan problem ketidakadilan, kemiskinan, juga kebodohan. Kuntowijoyo, dalam pengantar buku ini menyampaikan bahwa proses sosiologis yang serius dan mobilitas sosial yang sedang berlangsung di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan santri, secara agak terinci dijelaskan oleh Sdr. Abdul Munir Mul Khan. Buku ini merupakan pengembangan dari tesis S2-nya di Sosiologi UGM. Saya kira, buku ini perlu dibaca oleh para pengamat politik Islam, pemimpin umat, dan mereka yang merasa terlibat dalam perkembangan Islam di masa depan.

**Pancasila** - Pusat Studi Pancasila UNPAR

Sejak tahun 1945, Pancasila telah menjadi dasar berbangsa dan bernegara Indonesia. Ir. Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-

dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi. Selain itu, Ir. Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai weltanschauung bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung cita-cita, harapan, dan tujuan terbentuk dan berdirinya Indonesia bersatu. Melalui nilai-nilai Pancasila terciptalah sebuah masyarakat Indonesia yang kokoh dan harmonis. Pancasila, karena itu, menjadi pandangan dan keyakinan dasar bersama seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah perumusan dan pemikiran tentang Pancasila sejatinya merupakan sejarah penciptaan dan penentuan identitas dan roh kebangsaan Indonesia.

**Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia** - Iwan Satriawan  
2020-05-04

The fall of New Order Regime under President Suharto saw the emergence of Reformasi (Reformation) and the beginning of various institutional and governmental changes done in the pursuit of democracy in Indonesia. Constitutional justice is fundamental to the success of democratic transition in the country. One of the results democratic reform and constitutional changes after Reformasi in 1998 is the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Mediakarya - 1986

**Pejambon 1945: Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa** - Daradjadi & Osa Kurniawan Ilham 2021-04-21

Dokumen asli berupa notulen sidang BPUPK (28 Mei-16 Juli 1945) dan PPKI (18-22 Agustus 1945) sesungguhnya bukanlah dokumen biasa yang kering makna dan kisah. Membacanya lembar demi lembar, notulen itu bagaikan rangkaian kisah yang menyusun sebuah drama dengan para pendiri bangsa sebagai lakon sekaligus bidan dalam pentas sejarah kelahiran Indonesia. Mulai dari adegan penyampaian buah pikir, adu debat, intonasi yang meninggi hingga pukulan tangan di atas meja sebagai pelampiasan kekesalan, tetapi ada pula air mata yang menetes dan sikap ikhlas mau berbagi dan menerima. Dengan bahasa kata dan cinta, buku ini hadir dengan harapan semoga masyarakat Indonesia bisa

merasakan bahwa negara bangsanya telah dilahirkan oleh cinta. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama.

*Pancasila & Undang-Undang* - Dr. Backy Krisnayuda, S.H., M.H.  
2017-01-28

Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantasnya pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang. Untuk itu, muncullah pertanyaan

bagaimana cara menanamkan ruh Pancasila dalam undang-undang? Jawaban yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

**Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945** - E. Fernando M. Manullang 2017-07-03

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk mengangkat kembali persoalan sekitar UUD 1945, yang terus muncul dan tak pernah berakhir, semenjak ia diamendemen pada awal abad ke-21 ini. Persoalan itu berkisar pada romantisme yang menghendaki kita, Republik Indonesia, untuk kembali ke UUD 1945 asli. Romantisme itu didorong pada semacam ketidakpuasan sebagian pihak yang melihat praktik-praktik ekonomi di masa sekarang yang lebih bernuansa liberal atau propasar. Tambah lagi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang propasar itu tidak terbukti memberikan kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Itu mungkin terjadi, menurut kalangan yang tidak puas itu, karena spirit konstitusi kemerdekaan republik ini, UUD 1945, telah dimanipulasi, dan bahkan relatif disingkirkan, oleh agenda-agenda neokolonialisme dan neoliberalisme. Yang menarik di atas fenomena tersebut, mengapa sedemikian menariknya UUD 1945 ini, sehingga masih terus digadang-

gadang sebagai jawaban atas kekacauan di atas? Mengapa semangat baru di masa kini tetap tidak diterima, terlepas adanya kecacatan sistematis di dalam UUD 1945? Lalu mengapa jika semangat baru diadakan, tetap saja romantisme akan hal yang baik dari UUD 1945 tetap dipelihara? Di sinilah alasan tambahan lainnya yang menjadi latar mengapa naskah ini dipublikasikan di masa sekarang. Saya menduga, ini disebabkan oleh sifat harmonis yang ditawarkan oleh UUD 1945, yang menurut tuduhan sebagian pihak, telah musnah dalam amendemen 1945. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup  
*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* - Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1998

*Kontroversi dan rekonstruksi sejarah* - Slamet Sutrisno 2003

*A History of Christianity in Indonesia* - Jan Sihar Aritonang 2008  
Indonesia is the home of the largest single Muslim community of the world. Its Christian community, about 10% of the population, has until now received no overall description in English. Through cooperation of 26 Indonesian and European scholars, Protestants and Catholics, a broad and balanced picture is given of its 24 million Christians. This book sketches the growth of Christianity during the Portuguese period (1511-1605), it presents a fair account of developments under the Dutch colonial administration (1605-1942) and is more elaborate for the period of the Indonesian Republic (since 1945). It emphasizes the regional differences in this huge country, because most Christians live outside the main island of Java. Muslim-Christian relations, as well as the tensions between foreign missionaries and local theology, receive special attention.

*Prosiding FGD Pakar II* -

*Prince in a Republic* - John Monfries 2016-05-13  
Hamengku Buwono IX, the late Sultan of Yogyakarta Special Province, is

revered by Indonesians as one of the great founders of the modern Indonesian state. He leaves a positive but in some ways ambiguous legacy in political terms. His most conspicuous achievement was the survival of hereditary Yogyakarta kingship, and he provided rare stability and continuity in Indonesia's highly fractured modern history. Under the New Order, Hamengku Buwono also helped to launch the Indonesian economy on a much stronger growth path. Although remembered as the epitome of "political decency", he faded from power and influence as Vice President in the 1970s, and the repressive and anti-democratic features of Suharto's New Order seemed to contradict much of what Hamengku Buwono originally stood for. This biography seeks to explain his political standpoint, motivations, and achievements, and set his career in the context of his times.

**Social Justice** - Agus Wahyudi 2021-05-10

The following book *Social Justice: A Sketch of the West and Islamic World Experiences* contains a collection of articles that may be read individually, each concerned with the same issues of social justice. The writers in this book originate from the Western and Islamic World's countries. All have agreed to explore and contribute to understanding social justice in each pertinent countries' experiences. The problems being addressed are either descriptive or valuational and, in most cases, are the combination of both. All articles presented in this collection are mainly a reexamination of social justice ideals from the authors' viewpoints and experiences and how the ideals may be applicable and considered relevant to a particular problem faced by the respective countries. As its generic meaning is commonly recognized, all authors see that social justice is the most fundamental virtue, crucially providential, to be the basis of interpersonal relations ordering and establishing and maintaining a stable political society. While the nature, origin, and legitimate application of social justice are a thing that may be debatable, all authors in this book concur with the notion that there is a need to struggle for a just society. This idea may be best developed to respect persons as free, rational agents without ignoring the particularities of its communities' challenges, characters, and identities.

**Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 - Indonesia.** Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1995

Documentation of the proceedings of the Explorative Council on Preparatory Efforts for Indonesia's Freedom, May 28-June 1 & July 10-17, 1945 and of the Committee for the Preparation of Indonesia's freedom, August, 18-22, 1945.

*Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0* - Emilia, SH., MKn. 2022-07-05

Tantangan bangsa Indonesia hari ini dan masa revolusi 4.0 semakin kompleks dengan ruang globalisasi yang semakin terbuka. Untuk itu bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki intelektualitas tinggi tetapi juga memiliki kepribadian yang luhur, berkarakter, berakhlak mulia, taat aturan dan hukum serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam berbagai aspek yang pada gilirannya terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Buku ini dirancang dalam upaya ikut berpartisipasi untuk mewujudkan warga negara milenial pada masa revolusi 4.0 yang beretika dalam kompleksitas kehidupan berbangsa. Guna mewujudkan harapan itu buku ini berintikan pokok bahasan mengenai dasar filosofi, yuridis dan sosiologis pendidikan kewarganegaran, negara dan sistem pemerintahan, identitas nasional sebagai karakter bangsa, demokrasi antara teori dan pelaksanaannya di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, konstitusi dan rule of law, hak asasi manusia di Indonesia, wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, relasi agama dan negara, otonomi daerah dalam bingkai NKRI serta konsep dan implementasi Good Governance serta diakhiri dengan peranan Indonesia dalam globalisasi.

*Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen* - Pandji Setijo



**Constitutions, Religion and Politics in Asia** - Dian A. H. Shah  
2017-10-26

Shah uncovers the complex interaction between constitutional law, religion and politics in three key plural societies in Asia.

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman - Mohammad Kamaludin 2021-01-21

Banyak hal yang harus dicatat ketika penulis memulai berfikir tentang persoalan sosial dewasa ini. Catatan itu berasal dari diskusidiskusi kecil di kelas bersama mahasiswa selama proses pembelajaran. Tak disangka dan dinyana bahwa sembulan ide-ide cemerlang bisa lahir dari pikiran sederhana seorang mahasiswa yang sebenarnya buta sama sekali dengan persoalan ilmu sosial dan budaya. Nyatanya ilmu sosial dan budaya harus mengikuti perkembangan yang demikian dinamis dan pesat di luar sana berbanding terbalik dengan keadaan dalam teks buku yang statis.

Tantangan bagi para penulis buku ajar untuk melihat perkembangan bukan untuk tahun ajaran ini saja namun secara harian diikuti guna mendapatkan infomasi segar. Pengelolaan informasi penting dilakukan oleh pengajar Ilmu Sosial dan Budaya demi mengejar ketertinggalan. Sehingga jangan sampai mahasiswa akan lebih tahu persoalan sosial dan mampu mencari solusi terhadapnya dari pada pengajar ilmu Sosial dan Budaya di tingkat dasar. Kini yang disebut sebagai era disrupsi, tidak ada jaminan untuk siapa pun bisa mengunci informasi agar tidak tersebar luas. Informasi bisa datang dari mana pun dan diinterpretasikan oleh siapa pun. Termasuk mahasiswa yang lahir di era generasi Z, merupakan salah satu faktor penentu arah pengetahuan sosial yang harus masuk dalam daftar yang diperhitungkan. Pengajar bisa mencermati informasi yang hadir di kelas kecil lalu mengambil pelajaran berharga dan dicatat sebagai sebetuk pengetahuan baru.

BUKU AJAR PANCASILA - Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., C.T.L. 2022-03-23

Buku ini menjadi pedoman ajar bagi mahasiswa dalam matakuliah Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan Pancasila diharapkan

mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep ideologis Pancasila sebagai ideologi negara serta secara kreatif dan inovatif mengaplikasikannya pada berbagai keputusan-keputusan etis.

**Paradigma Baru Pendidikan Pancasila** - Winarno 2016-10-01

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila sebagai Dasar Negara, (4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (5) Pancasila sebagai Filsafat, (6) Pancasila sebagai Etika, dan (7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini merupakan hasil pembaruan atas substansi kajian Pendidikan Pancasila sebelumnya, yakni kajian Pendidikan Pancasila berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua bidang jenjang sarjana maupun diploma.

Hukum Persaingan Usaha - Dr. Cita Citrawinda, S.H, M.I.P 2021-03-16

Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang memuat bahasan mengenai hokum persaingan usaha secara keseluruhan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Persaingan Usaha mulai dari sejarah dan perkembangannya, dasar hukum, tujuan dibentuknya, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta perbandingan penyelesaian sengketa persaingan usaha di beberapa negara.